



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MEKANISME PELAYANAN TERHADAP PENDAFTARAN PENDUDUK PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN  
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau*

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DELWITA ELSANTI**

**11627203986**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**PEKANBARU-RIAU**

**1441 H/2020 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***“Mekanisme Pelayanan Terhadap Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*** yang ditulis oleh:

Nama : DELWITA ELSANTI

NIM : 11627203986

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Syawal 1441 H  
09 Juni 2020 M

Pembimbing Skripsi

**Dr. Abu Samah, MH.**  
**NIK. 130112055**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: MEKANISME PELAYANAN TERHADAP PENDAFTARAN PENDUDUK  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN  
PENCATATAN SIPIL

Nama Panulis

: DELWITA ELSANTI

NIM

: 11627203986

## Program Studi

: ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 25 Juni 2020

Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru,

2020

Tim Penguji



1. Firdaus, SH, MH  
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Roni Kurniawan, SH., MH  
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Hani Nuraini Sahu, SH., MH  
(Anggota Penguji)
4. Lovelly Dwina Daheh, SH., MH  
(Anggota Penguji)

## Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.**

NIP. 19580712 198601 1 005

1. Firdausy (S)

2. Rani (S)

3. Hani (A)

4. Laila (A)

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PLAGIAT**

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Delwita Elsanti  
 Nim : 11627203986  
 Tempat Tanggal Lahir : Kota Baru 10 Juni 1998  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Mekanisme Pelayanan terhadap Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indagiri Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ”**, adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan

**Delwita Elsanti**  
**NIM. 11627203986**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Delwita Elsanti, (2020): Mekanisme Pelayanan terhadap Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**

Penelitian ini membahas tentang mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rektan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Bab I Pasal 1 ayat (1).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan faktor penghambat dalam mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Yuridis Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, sedangkan sifat penelitiannya adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, dan didapatkan dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan mewawancarai pegawai dinas di dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu belum terlaksana dengan baik, karena masih adanya mekanisme atau tahapan yang belum dilaksanakan seperti pelaporan, perekaman data, serta pencatatan dan/atau penerbitan dokumen, sebagaimana yang terdapat pada pasal 63 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sedangkan faktor yang menghambat dalam mekanisme pelayanan pendaftaran penduduk pada penelitian ini ialah kurangnya pegawai dinas ataupun minimnya sumber daya manusia, karena dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sangat diperlukan adanya sumber daya manusia agar tidak terjadinya rangkap jabatan, adanya data yang kurang lengkap seperti yang tidak seolah tentu tidak memiliki ijazah, akses menuju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari sebagian Kecamatan tergolong jauh, sehingga yang tidak bersangkutan yang membawa dokumennya melainkan orang lain, terdapatnya masyarakat yang tidak memiliki NIK/Identitas, dan terjadinya *Duplicate Record*.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat bersta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Darmawil dan Ibunda Eliya yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik
4. Bapak Firdaus, SH, MH. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Abu Samah, MH. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semua ilmu yang diberikan sangat berharga dan berarti bagi penulis dimasa depan.
7. Kepala Dinas dan seluruh pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Keluarga besar yang telah memberikan motivasi serta do'a nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dan melaksanakan perkuliahan dengan baik.
9. Kepada teman-teman Ilmu Hukum D dan team JSQ yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan selama kuliah. Dan teman-teman angkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.
10. Kepada semua senior yang telah membantu dan berbagi ilmu dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga Skripsi ini membari manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 06 Juni 2020

UIN SUSKA RIAU

**DELWITA ELSANTI**  
**NIM. 11627203986**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	16
 <b>BAB II           GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu....	18
B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu .....	26
 <b>BAB III        TINJAUAN TEORITIS TENTANG MEKANISME PELAYANAN       TERHADAP       PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	
A. Teori Pembagian Kekuasaan .....	54
B. Teori Hak Asasi Manusia .....	61
C. Teori Administrasi Kependudukan .....	65



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelayanan Terhadap Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil.....	73
B. Faktor Penghambat Dalam Mekanisme Pelayanan terhadap Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil .....	82

## BAB V

### PENUTUP

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b>	Jumlah Populasi dan Sampel yang Dijadikan Responden....	13
<b>Tabel II.1</b>	Nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu .....	22
<b>Tabel IV.1</b>	Tanggapan Masyarakat Tentang Informasi Prosedur Pelayanan Pendaftaran Penduduk.....	78
<b>Tabel IV.2</b>	Tanggapan Masyarakat Tentang Informasi Persyaratan Pendaftaran Penduduk .....	79
<b>Tabel IV.3</b>	Tanggapan Masyarakat Tentang Apakah Kemampuan Petugas Sudah Cukup Jelas Dalam Memberikan Informasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk.....	79
<b>Tabel IV.4</b>	Tanggapan Masyarakat Tentang Apakah Petugas Pelayanan Bersikap Ramah Dalam Memberikan Pelayanan.....	80
<b>Tabel IV.5</b>	Tanggapan Masyarakat tentang Apakah Waktu Penyelesaian Akta Pencatatan Sipil Sudah Tepat Waktu Dengan Ketentuan Yang Berlaku .....	81

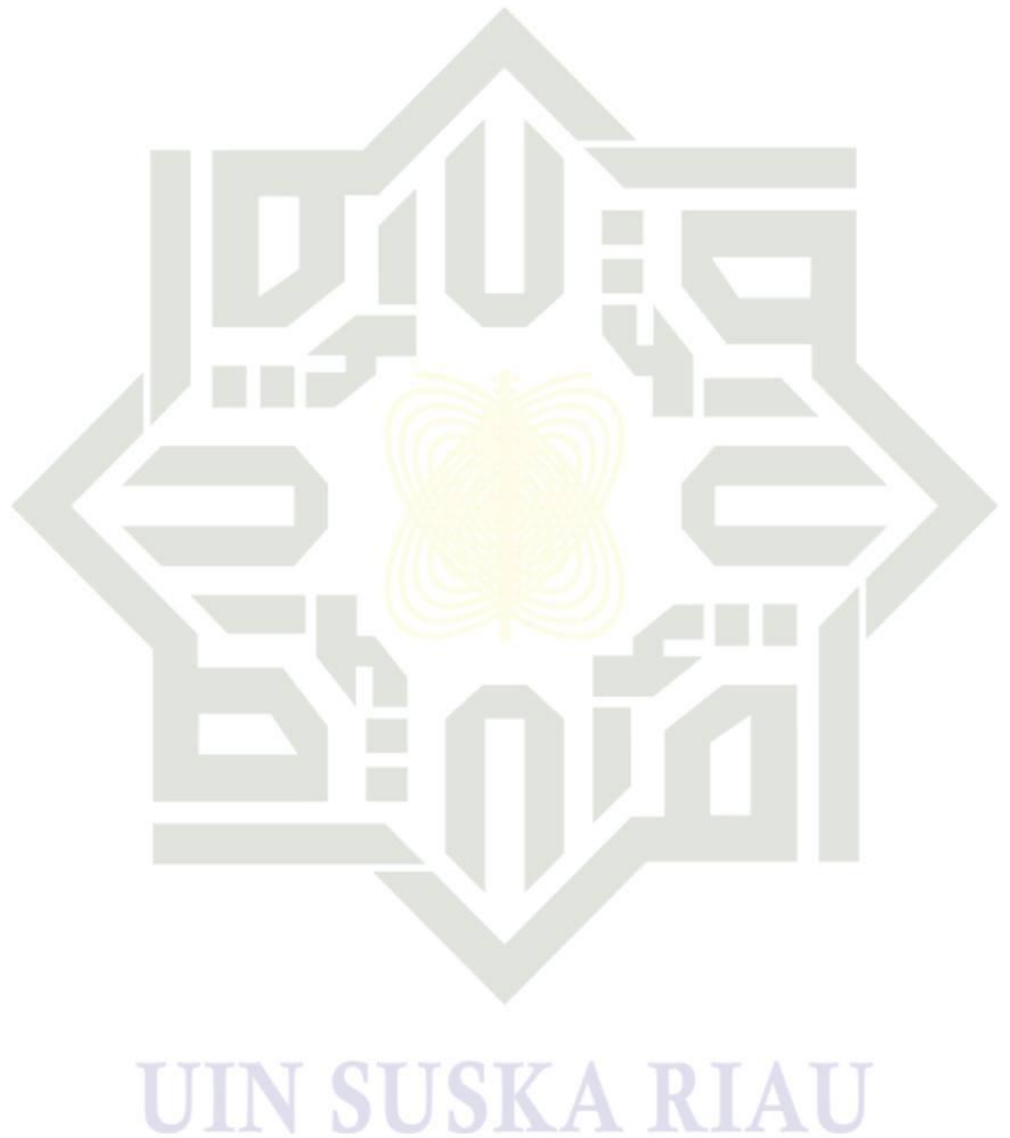
UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar II.1</b>	Wilayah Administrasi Kabupaten Indragiri Hulu .....	24
<b>Gambar II.2</b>	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.....	29





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selama berlangsungnya pemerintahan Orde Baru, segala kebijakan tentang daerah selalu diputuskan oleh pusat. Daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengembangkan potensi daerahnya dan akhirnya menjadi sangat tergantung dengan pusat.<sup>1</sup> Secara filosofis, fungsi negara mengembangkan tugas penting yaitu melindungi dan mensejahterakan rakyat. Dalam rangka mensejahterakan rakyat itulah, maka negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi seluruh pemenuhan hak setiap warga negara. Oleh karena itulah maka lahirlah peran negara yang dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan dengan tugas pokok yaitu mempertemukan dan mengatur berbagai kebutuhan dan kepentingan warga negara baik hanya untuk individual maupun kelompok masyarakat secara adil dan non diskriminasi.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah adanya aturan baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>3</sup> Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 79

<sup>2</sup> Hesti Puspitosari, dkk, *Filosofi Pelayanan Publik*, (Malang : Setara Press, 2011), h. 9

<sup>3</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 1

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi dirumuskan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan urusan kepada pemerintah daerah dilakukan pada waktu pembentukan daerah otonom yang bersangkutan, baik kepada daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten dan Kota yang dilakukan dan diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom bersangkutan dan disebut kewenangan pangkal. Kewenangan pangkal meliputi beberapa urusan, adapun urusan yang merupakan kewenangan pangkal sebagai berikut : Urusan lingkup pertanian, urusan kesehatan, Urusan pekerjaan umum, Urusan sosial, Urusan pendidikan dasar, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Desentralisasi adalah instrumen pencapaian tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa yang demokratis. Untuk itu, harus diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat kesatuan nasional. Dapat disimpulkan, tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran keberhasilannya adalah terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan adil dalam hal pendapatan dan terciptanya rasa aman. Salah satu aspek penting lainnya adalah pemberdayaan masyarakat

---

<sup>4</sup> Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), h. 18-20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta penyelenggaraan layanan publik.<sup>5</sup>

Pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, ialah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dana pelayanan administratif.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Publik merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak setiap warganya. Untuk mempermudah tersampainya pelayanan pemerintah kepada masyarakat maka diperlukan adanya model pelayanan publik. Dalam konsep pelayanan publik terdapat beberapa model. Penggunaan model-model ini tergantung pada kondisi dan situasi yang ada di wilayah

---

<sup>5</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa, 2009), h. 129



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana pelayanan tersebut diselenggarakan. Karena disetiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing baik sosial, ekonomi dan wilayah topografi.<sup>6</sup>

Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu dalam bentuk barang jasa kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi.<sup>8</sup>

Pelayanan publik atau pelayanan umum menurut Sadu Wasistiono adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

<sup>6</sup> Lely Indah Mindarti, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Malang : UB Press, 2016), h. 1

<sup>7</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008), h. 136

<sup>8</sup> Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011 ), h. 106

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terdapat dua faktor penyebab timbulnya pelayanan publik, yaitu : Faktor yang bersifat ideal, dan faktor yang bersifat material.<sup>9</sup>

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya tranformasi nilai yang berdemensi serta dampak pembangunan yang kompleks. Pelayanan publik sangatlah penting dan baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Pelayanan dalam bentuk jasa sangat diperlukan dalam masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan penyelenggaraan pelayanan yang lainnya. Sementara itu pelayanan dalam bentuk barang ialah fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat, seperti jalan raya dan air bersih.

Dalam sebuah kebijakan publik sebaiknya harus terdapat di dalamnya tiga hal pokok, yaitu pertama adalah adanya aturan hukum peraturan perundangan yang legitimate, kedua adalah adanya aspek prosedural yang harus diikuti, ketiga adalah adanya subtransi yang betul-betul memihak pada kepentingan publik dari kebijakan-kebijakan publik tersebut. Dan dari ketiga hal ini dapat memperlihatkan hubungan hukum dan kebijakan publik terdapat pertalian yang sangat erat.<sup>10</sup> Selain itu, terdapat pola dan model penyelenggaraan pelayanan umum (yanum) adalah kesatuan bentuk tata penyelenggaraan pelayanan yang didasarkan pada suatu prosedur dan tata

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 122

<sup>10</sup> Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Malang : Averroes Press, 2002), h. 175

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kerja atau rangkaian kegiatan tertentu yang dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan sendi atau prinsip-prinsip pelayanan umum.

Sistem pelayanan publik terdiri dari empat faktor : *Pertama*, sistem, prosedur dan metode, yaitu dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dan memberikan pelayanan, *kedua*, personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur, dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pemerintah harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat, *ketiga*, sarana dan prasarana, dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik misalnya ruang tunggu, dan tempat parkir yang memadai, *keempat*, masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

Sesuai dengan jenis dan sifat pelayanan, agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan umum secara efektif, maka dalam penyelenggaraan pelayanan umum, sesuai dengan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003, dapat dilaksanakan dengan pola-pola pelayanan sebagai berikut : Pola pelayanan fungsional, Pola terpusat, Pola terpadu, dan Pola gugus tugas.<sup>11</sup>

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi pelayanan publik.

Pelayanan kependudukan ini meliputi Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga, Kartu

<sup>11</sup> Bambang Istianto, *Op. Cit.*, h. 110-111



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tanda Penduduk (e – KTP), selain Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sistem Administrasi Kependudukan juga meliputi seluruh peristiwa penting dan peristiwa kependudukan seperti surat pindah dan pendataan penduduk. sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.<sup>12</sup>

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang terdapat pada pasal 63 dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib terdaftar dalam kependudukan dengan mekanisme seperti: Pelaporan, Verifikasi dan validasi, Perekaman data, dan pencatatan dan/atau penerbitan dokumen. Namun kenyataannya peneliti mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun permasalahannya yaitu : pertama, belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengetahui validitas informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedua, adanya keluhan dari masyarakat tentang ketidakramahan petugas dalam pelayanan terhadap masyarakat. Ketiga, tidak tepatnya waktu dalam pemberian dokumen kepada masyarakat.<sup>13</sup>

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran penduduk, maka penting diadakan penelitian. Oleh karena itu saya tertarik meneliti mengenai: **“MEKANISME PELAYANAN TERHADAP PENDAFTARAN PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL”**

#### B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, agar pembahasan pada penelitian lebih terarah dan lebih mudah dipahami. Maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini dan difokuskan pada Mekanisme Pelayanan terhadap Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu.

<sup>13</sup><https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kab-indragiri-hulu/done?page=3>, diakses pada Jum'at 29 November 2019 Pukul 07.29 WIB

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pelayanan terhadap Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Mekanisme Pelayanan terhadap Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- b. Mengetahui faktor yang menjadi penghambat mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat mengetahui mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 2) Dapat mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

##### b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran penduduk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Manfaat Akademis

- 1) Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang mekanisme pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 3) Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum Tata Negara.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

**1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data awalnya.<sup>15</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

## **3. Objek dan Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, dan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang bertempat di Jl. Raya Pematang Rebah, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## **4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>17</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang terlibat dalam

<sup>15</sup> Amiruddin, Zainal Asikin *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 22

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>17</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 115



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang berjumlah 429.536 orang. Dan 5 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dan merupakan sumber data untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Random Sampling*. *Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel yang Dijadikan Responden**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Masyarakat yang mengurus pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu	429.536 orang	95 orang	0.02%
2	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu	1 orang	1 orang	100%
3	Pegawai Dinas Bagian Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu	4 orang	3 orang	75%
4	Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Indragiri Hulu	9 orang	1 orang	11.11%
	<b>Jumlah</b>	<b>429.550 orang</b>	<b>100 orang</b>	<b>0.02%</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data awal yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian dengan cara pengamatan, menyebar angket dan wawancara langsung kepada responden terpilih.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang didapatkan dari dokumen resmi, dalam bentuk laporan catatan, dan dokumen melalui tempat kantor peneliti serta melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

### c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang berupa karya ilmiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian terhadap fenomena-fenomena untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan sejenis interview dengan narasumber atau responden untuk menggali berbagai informasi yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.<sup>18</sup>

c. Angket

Peneliti menggunakan angket yang disebarakan kepada narasumber yang berisikan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh data yang dibutuhkan.

- d. Kajian pustaka merupakan metode pengumpulan data berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dapat mendukung dan menggunakan yang penulis lakukan.

**7. Analisis Data**

Untuk mengetahui Pelayanan dalam pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi yang dijabarkan secara menyeluruh, dan kemudian data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Dengan metode analisa data ini, peneliti dapat mengetahui mekanisme pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

---

<sup>18</sup>Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 127



## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum Kabupaten Indragiri Hulu

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini berisi tentang teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan yang meliputi mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran penduduk serta faktor penghambat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan Mekanisme Pelayanan Terhadap Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dan faktor Penghambat dalam Mekanisme Pelayanan Terhadap Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya disamping kesimpulan dalam bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama dibidang hukum tata negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu

##### 1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri.

Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri.

Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Benkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kota madya Pekanbaru.

Dengan dibentuknya Provinsi Riau dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royon Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPR pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan kecamatan , sekarang 11 kecamatan.
2. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :
  - a. Kec. Rengat Ibukota Rengat
  - b. Kec Pasir Penyu ibukota Air Molek
  - c. Kec Seberida ibukota Pangkalan Kasai
  - d. Kec. Peranap ibukota Peranap
  - e. Kec. Kuantan Hilir ibukora Baserah
  - f. Kec kuantan tenah ibukota Taluk Kuantan.
  - g. Kec. Kuantan Mudik ibukota Lubuk Jambi
  - h. Kec. Singingi ibukota Muara Lembu.

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Renat, Kecamatan Yang baru adalah :

1. Kec. Benai ibukota Benai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kec. Kelayang ibukota Simpang Kelayang
3. Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba.

## 2. Letak Geografis Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu terletak di bagian selatan Provinsi Riau, terdiri dari daerah dataran rendah dataran tinggi dan rawa-rawa dengan luas lebih kurang 8.198,25 km (819.826 Ha), yang secara geografis terletak pada posisi 0<sup>0</sup>15 lintang utara 1<sup>0</sup>5 lintang selatan, 101<sup>0</sup>10 bujur timur dan 102<sup>0</sup>48 Bujur Barat.

Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Pelalawan
- b. Sebelah selatan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Prov.Jambi)
- c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. Dalam beberapa dekade terakhir daerah ini mengalami perubahan yang signifikan untuk menjadi sebuah daerah sentra baru bagi pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu adalah Kota Rengat tetapi aktivitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18km dari Kota Rengat.

Sekilas pandang tentang fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu saat ini meliputi jaringan jalan dengan panjang 1.590,62 km. Pelabuhan sungai di Kecamatan Kualu Cenaku, 21 km dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rengat, dapat menampung kapal dengan 1,500 dwt, lapangan terbang darurat di Japura yang hanya dapat menampung pesawat terbang ukuran kecil seperti F-27, DHN-7 dan C-160. Menurut rencana dimasa depan lapangan terbang ini diharapkan dapat diperluas agar mampu menampung pesawat terbang ukuran besar.

Fasilitas dan infrastruktur lain yang telah ada saat ini adalah listrik dengan kapasitas 33.726 KWH disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (tenaga diesel), air bersih, jasa pos, jaringan telepon, perbankan (Bank Nasional dan Lokal), fasilitas kesehatan dan beberapa fasilitas akomodasi (hotel berbintang dan non bintang) yang tersebar di beberapa kota seperti Rengat, Rengar Barat, Air Molek, Seberida dan Peranap.

Kabupaten Indragiri dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 selanjutnya dimekarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1965, dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukota Tembilahan dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat.

Pada Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Sedangkan jumlah Kecamatan pada tahun 2004 hanya terdiri dari 9 kecamatan, melalui pemekaran wilayah kecamatan sehingga pada tahun 2019 menjadi 14 Kecamatan seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :



**Tabel II.1**

**Nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan
1.	Rengat	Rengat
2.	Rengat Barat	Pematang Reba
3.	Kelayang	Simpang Kelayang
4.	Pasir Penyu	Air Molek
5.	Peranap	Peranap
6.	Seberida	Pangkalan Kasai
7.	Batang Cenaku	Aur Cina
8.	Batang Gansal	Seberida
9.	Lirik	Lirik
10.	Kuala Cenaku	Kuala Cenaku
11.	Sungai Lala	Kelawat
12.	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Tinggal
13.	Rakit Kulim	Petonggan
14.	Batang Peranap	Selunak

Sumber data : Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekda Inhu

### 3. Topografi Kabupaten Indragiri Hulu

Secara Umum Topografi Kabupaten Indragiri Hulu merupakan wilayah dataran rendah, perbukitan dan rawa-rawa dengan ketinggian 5 sampai dengan 400 m diatas permukaan laut. Bagian yang terluas dari dataran rendah terletak pada ketinggian 25 s/d 100 meter diatas permukaan laut yang sebagian besar ditutupi oleh hutan dan tanah gambut . Kondisi yang demikian menyebabkan hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki potensi terhadap terjadinya bencana banjir. Potensi banjir tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor topografi wilayah yang rendah tapi juga dikontribusi oleh banjir kiriman dari daerah lain, mengingat beberapa sungai di daerah ini hulunya berada pada daerah lain.

Diantara sungai yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki peranan penting dan strategis adalah Sungai Indragiri dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

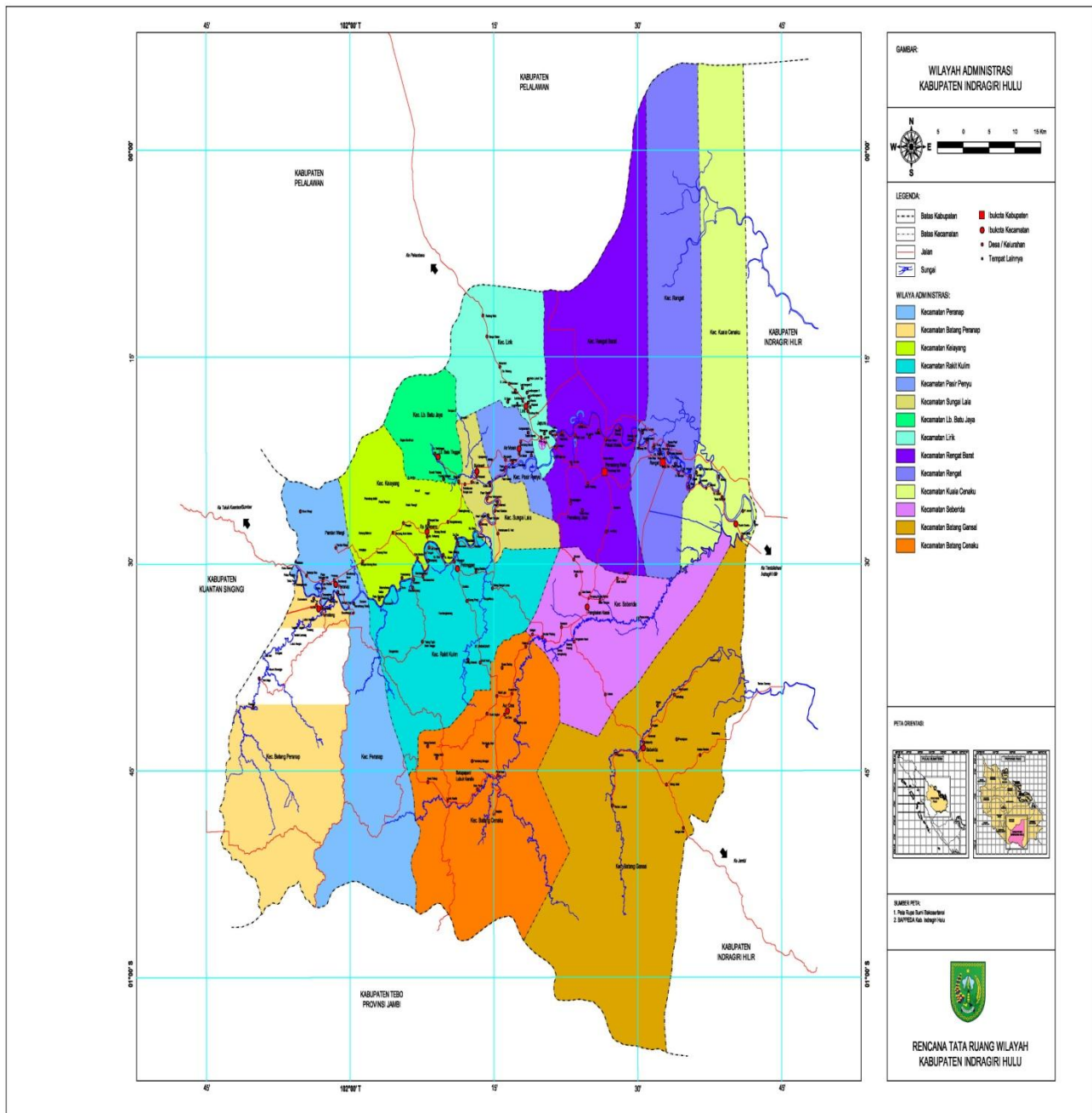
#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panjang  $\pm$  550 Km. Karena, Sungai Indragiri bukan saja melintasi Kabupaten Indragiri Hulu tetapi juga beberapa Kabupaten lainnya di Provinsi Riau, bahkan hulunya berada pada Danau Singkarak yang merupakan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jika dilihat dari posisi wilayah sungai mulai dari hulu sampai ke hilir, maka letak wilayah Kabupaten Indragiri Hulu berada pada bagian hilir Sungai Indragiri. Selain memberikan berkah, Sungai Indragiri juga sering mendatangkan musibah bagi kehidupan masyarakat Indragiri Hulu terutama yang tinggal disepanjang aliran sungai tersebut.

Pendangkalan Sungai Indragiri yang diakibatkan dari pemanfaatan sumberdaya lahan yang kurang terkendali baik untuk pemukiman, perkebunan, lahan pertanian maupun aktivitas masyarakat lainnya. Akibatnya kemampuan sungai untuk menampung volume air semakin menurun dan pada musim penghujan volume air yang melebihi daya tampung sungai menyebabkan terjadinya bencana banjir. Disisi lain, pada musim kemarau wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang pada umumnya merupakan rawa bergambut juga berpotensi terjadinya kebakaran lahan yang bukan saja berdampak negatif terhadap aspek kesehatan tapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

**Gambar II.1**  
**Wilayah Administrasi**  
**Kabupaten Indragiri Hulu**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu**

**a. Visi**

Kabupaten Indragiri Hulu yang maju, mandiri sejahtera, berbudaya dan agamis tahun 2020.

**b. Misi**

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.
- 2) Meningkatkan Pengawasan dalam tata kelola keuangan Daerah yang transparan dan Akuntabel.
- 3) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Meningkatkan pemerataan ketersediaan Insfrsruktur Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- 5) Meningkatkan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat daya saing daerah.
- 6) Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.
- 7) Meningkatkan Keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama dan profesi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu**

**1. Sejarah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak dibagian selatan Provinsi Riau, yang mana Dinas ini beralamat di Jl. Raya Pematang Reba, Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Riau 29351) dengan kepala dinasnya Syaiful Bahri, S.Sos dan pegawai yang berjumlah sebanyak 66 orang, pegawai Asn (31 orang) dan tenaga honorer (35 orang).

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya melaksanakan penataan dan penertiban Administrasi Kependudukan sesuai dengan Amanat Undang – Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan penyelenggaraan pemerintah bidang administrasi pemerintah yang menjadi kewajiban melalui penataan administrasi kependudukan melalui pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mendapatkan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan dokumen Negara atas status Kependudukan dan hak – hak sipil seseorang, pada hakekatnya tetap memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, terhitung tanggal 16 Oktober 2018.

**2. Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu**

**a. Visi**

Terwujudnya sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib, akurat dan dinamis.

**b. Misi**

Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk mewujudkan Misi ini ada beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aparatur yang terlibat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam penanganan Dokumen Kependudukan karena dengan kualitas aparatur yang baik, maka kegiatan pelayanan akan berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Indonesia, walaupun belum seluruhnya memanfaatkan teknologi tersebut karena satu dan lain hal.

3. Meningkatkan penyebaran informasi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat belum semuanya mengetahui tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu perlu diadakan penyebaran informasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kesempatan, agar pengetahuan dan wawasan masyarakat meningkat dan menindaklanjutinya. Selanjutnya warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran sertanya dalam penanganan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tanpa kepedulian dan peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu harus diupayakan bagaimana agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

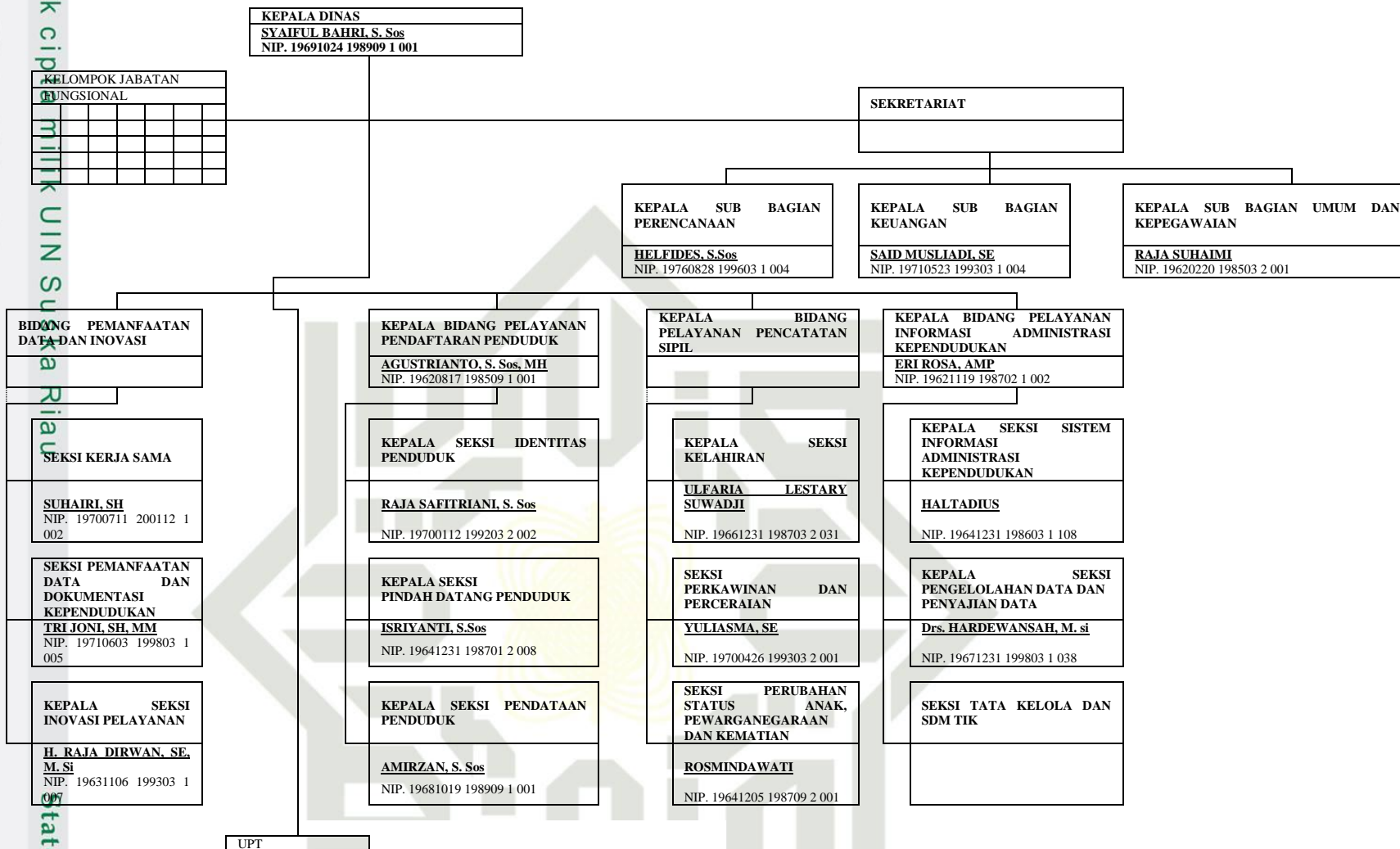
Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019

### 3. Struktur Organisasi

**GAMBAR II.2**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4. **Uraian Tugas (*job description*) Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu**

Susunan tugas dan fungsi di Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu

a. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menetapkan kebijakan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Merumuskan rencana strategis dan program kerja Dinas yang sesuai dengan visi misi Kepala Daerah.
- c. Merencanakan, Mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Membina dan mengarahkan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Membina pelaksanaan program pengawasan melekat dilingkungan dinas.
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap kedisiplinan pegawai dalam lingkup dinas.
- g. Melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup dinas.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait.
- i. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Sekretariat Dinas**

Sekretariat dinas mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasi dan menyusun program dan anggaran.
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan.
- c. Mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara.
- d. Mengelola urusan ASN.
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas terdiri atas :

**a. Sub Bagian Perencanaan**

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan dan evaluasi, program kegiatan dinas.

Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis dilingkungan kerja dinas.
- b. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan kerja dinas.
- c. Membina, mengkoordinasi, mengendalikan, mengawasi Perencanaan dan Evaluasi kegiatan dilingkungan kerja dinas.
- d. Melaksanakan Perencanaan dan Evaluasi dilingkungan kerja dinas.
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
- f. Menyusun Standar Pelayanan Minimal Program dan kegiatan.
- g. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- h. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian perencanaan.
- i. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk penyusunan rencana kegiatan dinas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana strategik dinas.
- k. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik.
- l. Menyiapkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dinas.
- m. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program / kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring.
- n. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan dinas dan menyusun LAKIP dinas.
- o. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub bagian perencanaan.
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf sub bagian perencanaan .
- q. Menyusun rencana kerja dan laporan kegiatan pertanggung jawaban dinas berupa LPPD, LKPJ, dan lainnya.
- r. Melaporkan kegiatan pelaksanaan pekerjaan rutin bulanan dan tahunan.
- s. Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada sekretaris mengenai langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.



## b. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan.
- b. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP).
- d. Menyiapkan surat perintah pembayaran (SPM).
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- f. Melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban (SPJ) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- g. Melaksanakan akuntansi dinas.
- h. Menyiapkan laporan keuangan dinas.
- i. Merencanakan program kerja pengelolaan dana di bidang keuangan dan pengelolaan biaya operasional rumah tangga dinas.
- j. Memberi petunjuk kepada bawahan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- k. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan Dinas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- m. Melaporkan tugas pelaksanaan pembinaan bidang keuangan dinas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. Membagi tugas pada bawahan sesuai dengan bidangnya.
- p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Membuat rencana operasional program kerja sub bagian umum.
- b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah dinas serta penggunaan kantor.
- c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan dinas serta rumah dinas kantor.
  - d. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas.
  - e. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas.
  - f. Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas.
  - g. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian.
  - h. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas.
  - i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada sekretaris mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
  - j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
  - k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran penduduk.
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- d. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk.
- e. Melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- f. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk.
- g. Mengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
- h. Melaksanakan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk .
- i. Memberikan bimbingan dan saran teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- j. Menginventarisasi data-data penduduk secara terus menerus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas.
- l. Merumuskan/melaksanakan kebijakan pembangunan serta layanan staf dan bimbingan teknis.
- m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- n. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
- o. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas :

**a. Seksi Identitas Penduduk**

Seksi identitas penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi. Seksi ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- b. Mencatat dan memutakhirkan biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mencatat dan melaksanakan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Identitas Anak.
- d. Mencatat perubahan alamat dan biodata penduduk.
- e. Menatausahakan pendaftaran penduduk.
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### b. Seksi Pindah Datang Penduduk

Seksi pindah datang penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk. Seksi pindah datang penduduk menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.
- b. Mencatat dan menerbitkan dokumen pindah datang penduduk dalam wilayah RI.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mencatat dan menerbitkan dokumen warga negara asing tinggal sementara dan tinggal tetap.
- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
- f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### c. Seksi Pendataan Penduduk

Seksi pendataan penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk. Seksi pendataan penduduk menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.
- b. Melaksanakan pendokumentasian dan menata hasil pelayanan pelayanan pendaftaran penduduk.
- c. Melaksanakan pendataan penduduk.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang fungsinya.
- e. Membagi tugas kepada bawahan.
- f. Menilai prestasi kerja bawahan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberi oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

**d. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil**

Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil. Bidang pelayanan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Menyusun perencanaan pelayanan pencatatan sipil.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pencatatan sipil.
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.
- d. Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil.
- e. Melaksanakan penertbitan dokumentasi pencatatan sipil.
- f. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil.
- g. Mengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang fungsinya.

Bidang pelayanan pencatatan sipil dibagi menjadi :

**a. Seksi Kelahiran**

Seksi kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.

Seksi kelahiran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.
- b. Mencatat dan menerbitkan Akte Kelahiran.
- c. Mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan kelahiran.
- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Menilai prestasi kerja bawahan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Seksi Perkawinan dan Perceraian**

Seksi perkawinan dan perceraian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian. Seksi ini menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
- b. Mencatat dan menerbitkan akte perkawinan.
- c. Mencatat dan menerbitkan akte perceraian.
- d. Mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian.
- e. Memberikan saran mengenai langkah dan tindakan yang sesuai dengan bidangnya.
- f. Membagi tugas kepada bawahan.
- g. Menilai prestasi kerja bawahan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.

**c. Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian.**

Seksi perubahan status anak, perwarganegaraan dan kematian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi.
- b. Melaksanakan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, dan pencatatan kematian.
- c. Mencatat dan menerbitkan Akta Pengakuan Anak.
- d. Mencatat pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- e. Mencatat perubahan dan pembatalan akta.
- f. Melakukan pendataan mengenai perubahan nama dan pengesahan anak.
- g. Mencatat dan menerbitkan Akta Kematian
- h. Mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan kematian.
- i. Melaksanakan pendokumentasian dan menata hasil pelayanan pencatatan sipil.
- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- k. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
- l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Seksi ini menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Menyusunan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi kependudukan.
- b. Merekam data hasil pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk dengan menggunakan SIAK.
- c. Mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- d. Membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data.
- e. Menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta penyediaan jaringan komunikasi data sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan.
- f. Memelihara dan perawatan perangkat SIAK.
- g. Menyediakan dan mendesiminasi informasi kependudukan.
- h. Mengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan terbagi menjadi :

**a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. Seksi ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.
- c. Menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta penyediaan jaringan komunikasi data sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan.
- d. Memberikan pelayanan dan informasi mengenai kependudukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data penduduk. Seksi ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi.
- b. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- c. Menyusun replika data kependudukan.
- d. Menyusun profil kependudukan dan proyeksi kependudukan.
- e. Merekam data hasil pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil.
- f. Melakukan pemutakhiran data penduduk dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan tata kelola sumber daya manusia serta teknologi informasi dan komunikasi administrasi kependudukan. Seksi ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi.
- b. Pelaksanaan tata kelola sumber daya manusia serta teknologi informasi dan komunikasi,
- c. Membina dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola informasi administrasi kependudukan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
- f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- e. Melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan.
- f. Melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- g. Mengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan terdiri atas :

**a. Seksi Kerjasama**

Seksi kerjasama menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan mengkoordinasikan dengan SKPD Kabupaten dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna ditingkat pusat.
- b. Melakukan kerjasama administrasi kependudukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memproses pemberian izin hak akses pemanfaatan data kependudukan melalui persetujuan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Mengkonsultasikan draft kerja sama dengan lembaga pengguna kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil.
- e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan**

Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan mengkoordinasikan serta melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen/arsip kependudukan.
- b. Merumuskan data kependudukan yang akan dimanfaatkan oleh lembaga pengguna.
- c. Lembaga pengguna wajib menggunakan Aplikasi data werehouse (data penduduk yang diolah melalui SIAK konsolidasi) yang dibangun Rektorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna secara insidentil dan berkala setiap enam bulan.
- e. Melaporkan hasil pengendalian/pengawasan dan evaluasi kepada menteri dalam negeri melalui gubernur secara insidentil dan berkala setiap enam bulan.
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Seksi Inovasi Pelayanan**

Seksi inovasi pelayanan menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, mebina dan mengkoordinasikan serta melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Melakukan evaluasi dan perubahan sistem pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
- f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS TENTANG MEKANISME PELAYANAN TERHADAP PENDAFTARAN PENDUDUK

### A. Teori Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu pembagian dan kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya pada pihak lain. Sementara itu, pembagian kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus) sesuatu. Dengan demikian, secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada suatu pihak atau lembaga.

Sedangkan menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memaknai pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Tujuan dari pembagian kekuasaan ialah untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada suatu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.<sup>21</sup> Terdapat dua istilah yang berhubungan dengan teori pemisahan kekuasaan yang akan diutarakan

<sup>21</sup> Wahono dan Abdul Atsar, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), h. 1-2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

oleh Jhon H Garvey dan T. Alexander Aleinikooff. Kedua istilah tersebut terjabarkan dalam teori pemisahan kekuasaan yang mengenal dua bentuk pembagian kekuasaan yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Desentralisasi berhubungan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah atau negara bagian, sedangkan fungsi negara berhubungan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal antara fungsi negara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Teori yang mencakup kedua pembagian kekuasaan baik dalam tatanan pemisahan kekuasaan fungsi negara maupun tatanan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian atau pemerintah daerah. Menurut Arthur Maass pembagian kekuasaan dapat bersifat horizontal yang disebut sebagai *capitaldivision of powers*, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal disebut sebagai *areal division of powers*. Dalam rangka *capital division of powers*, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif masing-masing diberikan kepada suatu badan. Sedangkan dalam rangka *areal division of powers*, fungsi-fungsi tertentu seperti moneter dan hubungan luar negeri diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan fungsi-fungsi lainnya diberikan kepada negara bagian atau pemerintah daerah.<sup>22</sup>

Selain itu, hubungan pembagian kekuasaan antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat yaitu untuk mencapai cita-cita nasional. Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih

<sup>22</sup> Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 83

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada suatu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa.<sup>23</sup>

Teori pembagian kekuasaan menimbulkan berbagai pengertian dalam berbagai hukum konstitusi, misalnya pemahaman tentang sistem *checks and balances*, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, delegasi kekuasaan legislatif, tanggung jawab eksekutif terhadap badan pembentuk undang-undang, hak uji materil, dan sebagainya. Oleh karena itu muncul berbagai modifikasi paham pembagian kekuasaan.<sup>24</sup> Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama.

Secara institusional, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan bagian yang lain. Akan tetapi dalam menjalankan kekuasaan dan wewenangnya, lembaga negara tidak terlepas atau terpisah secara mutlak dengan lembaga negara lain, hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin pemisahan kekuasaan. Dengan kata lain, UUD 1945 menganut asas pembagian kekuasaan dengan menunjuk pada jumlah badan-badan kenegaraan yang diatur didalamnya serta

<sup>23</sup> Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, & Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komperatif ata Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, volume 18, nomor 2, 2016, h. 330

<sup>24</sup> La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makassar : CV Social Politic Genius, 2019), h. 63

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

hubungan kekuasaan diantara badan-badan kenegaraan yang ada yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>25</sup>

Pada hakikatnya menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya.
2. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini lebih menitikberatkan pada pembedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

<sup>25</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia", Jurnal Daulat Hukum UNISSULA, volume 1, nomor 1, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2018), h. 174-175, td



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang mana pembagian kekuasaan horizontal pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi enam kekuasaan negara yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, eksaminatif/inspektif dan kekuasaan moneter. Sedangkan pembagian kekuasaan horizontal pada tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD prov/kab/kota).

Teori pembagian kekuasaan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Pembagian kekuasaan menurut John Locke, antara lain:
  1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
  2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
  3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.
- b. Konsep Trias Politica Montesquieu, antara lain:
  1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
  2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>26</sup>

Dari dua pendapat ini ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya. Dan Montesquieu juga menyatakan, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, maka tidak ada kebebasan.<sup>27</sup>

Dalam teori pembagian kekuasaan ini menjelaskan bahwa terdapat dua pembagian kekuasaan yaitu secara vertikal dan horizontal. Seperti yang penulis ketahui, bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal ialah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya. Yang mana pada pembagian kekuasaan ini

<sup>26</sup> Wahono dan Abdul Atsar, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), h. 3-8

<sup>27</sup> Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam", *Jurnal Selat UIR*, volume 4, nomor 1, (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2016), h. 116, td

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terdapat adanya asas Desentralisas, yaitu penyerahan kekuasaan atau wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini salah satunya ialah Pelayanan Administrasi Kependudukan, seperti memberikan pelayanan publik, pemenuhan hak-hak administratif dalam pengurusan Identitas Penduduk, penerbitan dokumen dan data kependudukan, serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan.

Sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal yang penulis ketahui adalah pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya. Adapun fungsi dari pembagian kekuasaan itu ialah : *Pertama*, kekuasaan legislatif berfungsi untuk membatasi kekuasaan eksekutif atau Presiden, sehingga tidak bisa sewenang-wenang dalam menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan legislatif ini dipegang oleh beberapa lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPD. *Kedua*, kekuasaan eksekutif berfungsi untuk melaksanakan undang-undang dan dipimpin oleh Kepala Negara. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh lembaga negara seperti Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah, yang dibantu oleh Wakil Presiden, dan para menteri dalam kabinetnya. *Ketiga*, kekuasaan yudikatif berfungsi untuk memutus pelanggaran hukum yang terjadi dalam struktur ketatanegaraan, termasuk juga untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan lainnya. Kekuasaan yudikatif jalankan oleh lembaga negara seperti MA, MK, dan KY.



## B. Teori Hak Asasi Manusia

Membicarakan hak asasi manusia (HAM), berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>28</sup> Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Serta hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.<sup>29</sup>

Hak asasi manusia merupakan rejim hukum internasional yang menjadi capaian paling penting dalam sejarah peradaban manusia modern. Sebagai sebuah teori dan praktik, rejim hak asasi manusia yang diakui secara internasional saat ini tidak berdiri di ruang hampa. Alih-alih mewujudkan secara langsung dan utuh seperti yang kita lihat sekarang, hak asasi manusia merupakan wacana yang terus mengalami evolusi pemikiran sesuai konteks ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya dunia. Hak asasi manusia secara singkat dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia

<sup>28</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UDD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 1

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semata-mata karena ia manusia, dan bukan karena diberikan oleh masyarakat atau hukum positif.<sup>30</sup>

Hak asasi manusia pertama kali digunakan secara resmi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani di San Francisco pada tanggal 25 juni 1945. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan universal karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis, budaya, dan agama atau keyakinan spiritualitasnya. Hak tersebut melekat pada kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun.<sup>31</sup>

Hak asasi manusia juga merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan hak asasi manusia sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka hak asasi manusia pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana hak asasi manusia bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara

<sup>30</sup> <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>, diakses pada Selasa 05 Mei 2020 Pukul 21.08 WIB

<sup>31</sup> Muhammad Asri, *Hak Asasi Manusia*, (Makassar : CV. Social Politic Genius, 2018), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

universal. Para pengkaji hak asasi manusia mencatat bahwa kelahiran wacana hak asasi manusia adalah sebagai reaksi atau tindakan yang diperankan oleh penguasa. Tindakan-tindakan tersebut pada akhirnya memunculkan kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus dilindungi. Sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka penegakan hak asasi manusia sangat tergantung dari konsistensi lembaga negara.<sup>32</sup>

Beberapa pengertian tentang HAM dari beberapa para ahli sebagai berikut :

- 1) C.de. Rover menyatakan Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya-miskin atau laki-laki perempuan.
- 2) Muladi menyatakan bahwa Hak asasi manusia (*human rights*) diartikan secara universal sebagai “hak-hak yang melekat di diri kita dan tanpanya kita tidak bisa hidup sebagai manusia” oleh masyarakat di dunia.
- 3) John Locke menyatakan bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini sangat fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

<sup>32</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UDD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Teori pemikiran tentang hak asasi manusia terbelah secara universal atau secara partikular. Universal maksudnya, hak tersebut diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia. Sedangkan partikularisme hak asasi manusia, yakni dalam negara tertentu dapat dibatasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu Negara.<sup>33</sup> Seperti yang kita ketahui, bahwa bagi manusia dirinya memiliki kehormatan yang harus dilindungi. Sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terdapat pada pasal 28B ayat (2), pasal 28C ayat (1), pasal 28D ayat (2), pasal 28F, pasal 28H ayat (1), pasal 28I ayat (2) dalam UUD 1945 tentang Hak asasi manusia (HAM) yang mengatur prinsip perlindungan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, peningkatan kualitas hidup, tidak diberlakukan diskriminatif, dan lain-lain. Hak-hak masyarakat tersebut adalah hak-hak yang diberikan perlindungan oleh konstitusi (hak konstitusional). Namun, hingga saat ini hak-hak yang terkait dengan pelayanan publik belum di *break-down* ke dalam undang-undang.<sup>34</sup>

Sehingga dalam teori ini jelas terdapatnya hak-hak dari warga negara tentang pelayanan administrasi kependudukan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang terdapat pada Pasal 26 yang berbunyi : Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

<sup>33</sup> Bayu Dwiwiddy Jatmiko "Menelisis Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945" Jurnal Panorama Hukum. volume 3. nomor 2. (2018), h. 21

<sup>34</sup> Nunuk Nuswardani, *Pengantar Hukum Administrasi*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 130

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setiap orang berhak memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga terdapat pada Pasal 52 ayat 1 yang menyebutkan bahwa : Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan salah satu hal penting yang melekat pada diri kita adalah Akta Kelahiran. Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Di samping itu Akta Kelahiran juga merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA). Sedangkan kewajiban Pemerintahnya terdapat pada Pasal 72 yang berbunyi : Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

#### C Teori Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>35</sup> Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

betapa pentingnya administrasi kependudukan untuk penerbitan dan terutama sebagai dokumen dasar yang akan menjadi rujukan dalam hal dokumen-dokumen selanjutnya.

Menurut Pasal 9 Dalam Undang-Undang ini juga dinyatakan bahwa Data kependudukan adalah data perorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dari pasal ini juga ditarik sebuah kesimpulan bahwa data kependudukan adalah data yang agregat dari kegiatan pendaftaran penduduk mulai dari hal yang paling bawah sampai ke tingkat nasional, data ini sangat diperlukan untuk memetakan kekuatan maupun kekurangan dari semua program yang sudah dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.<sup>36</sup>

Dalam organisasi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan yang terbaik kepada masyarakat. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai

<sup>36</sup> Hamirul, Kereta Troika Dalam Pelayanan Publik di Era Revolusi 4.0, (Jambi : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio, 2019), h. 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>37</sup>

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi : Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan, Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, Penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.<sup>38</sup>

Dasar hukum administrasi kependudukan di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana

<sup>37</sup> Wilige Eko Raharjo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar", *eJournal Administrasi Negara UR*, (Pekanbaru : Universitas Riau, 2007), h. 2

<sup>38</sup> Wika Difa Kartini, "Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu", *Jurnal Online Mahasiswa UR*, volume 6, edisi II, (Pekanbaru : Universitas Riau, 2019), H. 6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan perlu menerapkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Serta Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) yang mengatur Pelayanan Administrasi pembuatan KPT, pembuatan KK, pembuatan SKTM, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Perkawinan, Surat Pengantar Nikah, pembuatan Surat Pindah Datang/Domisili, maka Administrasi Kependudukan haruslah diselenggarakan dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa : Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari segi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dimana yang berperan penting dan yang berkewajiban menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peranan pemerintah adalah untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

memastikan bahwa interplay kepentingan pribadi bagi setiap individu bisa dijalankan secara bebas dan terbuka.<sup>39</sup>

Sedangkan Sufian Hanim mengatakan Administrasi adalah sebagai kegiatan suatu kelompok yang bekerjasama terdiri dari dua orang atau lebih yang terdapat pada semua usaha kelompok. Berdasarkan pengertian administrasi kependudukan diatas, maka ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi tiga komponen yaitu: Kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Sejak tahun 2006, pemerintah telah menetapkan kebijakan administrasi kependudukan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tertanggal 28 Juni 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Administrasi Kependudukan.<sup>40</sup>

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Administrasi

<sup>39</sup> Rahma Yunita, “Studi Pelayanan Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur”, *PeJournal Pemerintahan Integratif UIN MUL*, volume 5, nomor 3, (Kalimantan Timur : Universitas Mulawarman, 2017), h. 382-383, td.

<sup>40</sup> Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, & Minto Hadi, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu”, *Jurnal Administrasi Publik UB*, volume 1, nomor 5, (Malang: Universitas Brawijaya), h. 965, td.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerjasama dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>41</sup>

Pendaftaran penduduk di Indonesia pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Sistem ini menuntut penduduk lebih aktif dalam mendaftarkan diri kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk dilakukan pendataan terhadap dirinya. Pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan pembangunan kependudukan, pembangunan administrasi kependudukan berperan penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-aktacatatan sipil, termasuk Akta Kelahiran. Dengan adanya pelayanan administratif tersebut maka hak dan kebutuhan dasar warga negara akan terjamin karena dokumen yang dapat menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya tersebut sangat vital dalam kehidupan warga. Sehingga pelayanan tersebut sangat

<sup>41</sup> Mariati Rahman, *Ilmu Administrasi*, (Makasar : CV Sah Media, 2017), h. 2-3

<sup>42</sup> Firmanzah, *Persaingan, Ligitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 408

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara.<sup>43</sup>

Dalam hal ini, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mendata perkembangan penduduk Indonesia dengan melakukan proses administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Adapun proses yang dilakukan dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya pelayanan publik dan pembangunan sektor.

Adapun penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan Departemen Dalam Negeri bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk.
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu.

<sup>43</sup> Stefanus Arwandi Jai, Dody Setyawan, & Ignatius Adiwidjaja, "Implementasi Sitem Informasi Administrasi Kependudukan", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNITRI, volume 5, nomor 1, (Malang : Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2016), h. 35, td

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang dilakukan oleh Undang-Undang. Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pemerintah yang diwakili Departemen Dalam Negeri berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional.<sup>44</sup> Sehingga administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Firmanzah, *Op. Cit*, h. 407-409

<sup>45</sup> Koko Mulyanto Angkat, Abdul Kadir, & Isnaini, "Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dair", *Jurnal Administrasi Publik UMA*, (Medan : Universitas Medan Area, 2017), h. 34, td





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelayanan pendaftaran penduduk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu belum terlaksana dengan baik. Karena masih terdapat mekanisme pendaftaran penduduk yang belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang terdapat pada pasal 63 yang menyebutkan bahwa tahapan-tahapan ataupun mekanisme pendaftaran penduduk meliputi : pelaporan, verifikasi dan validasi, perekaman data, pencatatan dan/atau penerbitan dokumen. Sedangkan mekanisme pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu seperti : melengkapi persyaratan, mengisi blangko yang telah di siapkan dari desa masing-masing.
2. Faktor utama yang menjadi penghambat dalam mekanisme pelayanan terhadap pendaftaran penduduk adalah kurangnya pegawai dinas ataupun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimnya sumber daya manusia, karena dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sangat diperlukan adanya sumber daya manusia agar tidak terjadinya rangkap jabatan. Selain itu juga terdapat faktor lainnya yaitu : Adanya data yang kurang lengkap seperti yang tidak sekolah tentu tidak memiliki ijazah. Akses menuju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari sebagian Kecamatan tergolong jauh, sehingga yang tidak bersangkutan yang membawa dokumennya kesini melainkan orang lain. Terdapatnya masyarakat yang tidak memiliki NIK/Identitas. Dan terjadinya *Duplicate Record*, yaitu kondisi dimana seseorang melakukan perekaman E-KTP lebih dari sekali (perekaman ganda), yang menyebabkan *biometric* individu seseorang terekam secara identik.

**B. Saran**

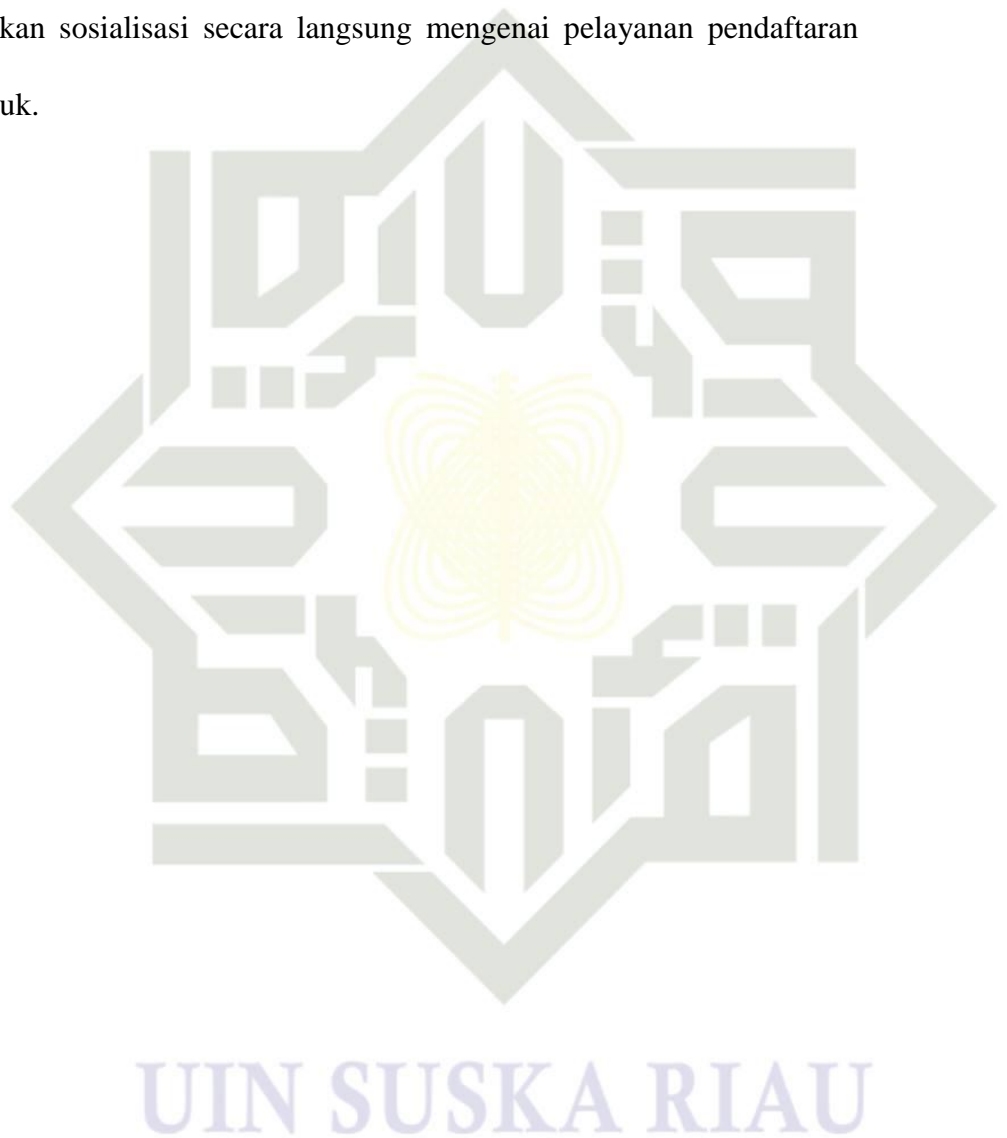
Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya sebagai berikut:

1. Harus adanya kesadaran Pemerintah Daerah dalam memperhatikan permasalahan pada pelaksanaan mekanisme pelayanan pendaftaran penduduk dan harus peduli terhadap kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, untuk mewujudkan pelaksanaan Administrasi Kependudukan. Serta memenuhi pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan prosedur yang sudah ada.

2. Untuk dinas yang terkait harus lebih peduli lagi terhadap kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelayanan pendaftaran penduduk, agar lebih optimal lagi seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara langsung mengenai pelayanan pendaftaran penduduk.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asri, Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia*. Makassar : CV. Social Politic Genius.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Firmanzah. 2010. *Persaingan, Ligitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamirul. 2019. *Kereta Troika Dalam Pelayanan Publik di Era Revolusi 4.0*. Jambi : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio.
- Hendratno, Edie Toet. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husen, La Ode. 2019. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar : CV. Social Politic Genius.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Kadir, Abdul. 2019. *Modul Pelatihan Aplikadi Sistem Administrasi Pemerintahan Desa Terpadu*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mindarti, Lely Indah. 2016. *Manajemen Pelayanan Publik*. Malang : UB Press.
- Moeljono, Djokosantoso. 2003. *Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang : Averroes Press.
- Muhtaj, Majda El. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UDD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta : Kencana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Napitupulu, Paimin. 2012. *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*. Bandung: PT. Alumni.
- Nuswardani, Nunuk. 2019. *Pengantar Hukum Administrasi*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Puspitosari, Hesti, dkk. 2011. *Filosofi Pelayanan Publik*. Malang : Setara Press.
- Rahman, Mariati. 2017. *Ilmu Administrasi*. Makasar : CV Sah Media.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa.
- Sellang, Kamaruddin, dkk, 2019. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman dan Philips. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabet.
- Wahono dan Abdul Atsar. 2019. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : CV. Budi Utama.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

### B. Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen, (Jakarta : Sandro Jaya).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 26.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 72.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Bab III Pasal 63.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

### C. Internet

<https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kab-indragiri-hulu/done?page=3>

<http://m.facebook.com/dinasdukcapilkotabengkulu/posts/1682971175314259>, diakses pada Jum'at 05 Juni 2020 Pukul 20.50 WIB

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>, diakses pada Selasa 05 Mei 2020 Pukul 21.08 WIB

### D. Jurnal

Bayu Dwiwiddy Jatmiko. 2018. Menelusik Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol 3 (2).

Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, & Minto Hadi. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1 (5).

Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, & Tri Mulyani. 2016. Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komperatif ata Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol 18 (2).

Koko Mulyanto Angkat, Abdul Kadir, & Isnaini. 2017. Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dair. *Jurnal Administrasi Publik*.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Rahma Yunita. 2017. Studi Pelayanan Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. *PeJournal Pemerintahan Integratif*. Vol 5 (3).
- Rika Marlina. 2018. Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indoneisa. *Jurnal Daulat Hukum*. Vol 1 (1)
- Stefanus Arwandi Jai, Dody Setyawan, & Ignatius Adiwidjaja. 2016. Implementasi Sitem Informasi Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 5 (1).
- Suparto. 2016. Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam. *Jurnal Selat*. Vol 4 (1).
- Wika Difa Kartini. 2019. Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol 6 edisi II.
- Wilige Eko Raharjo. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. *eJournal Administrasi Negara*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Bagaimana mekanisme/prosedur dalam pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pak ?
2. Selama dalam melayani masyarakat apa saja faktor yang menjadi penghambatnya ?
3. Bagaimana upaya atau langkah yang diambil dalam untuk menyelesaikan masalah tersebut ?
4. Setelah mengetahui adanya kendala tersebut, siapakah yang berwenang untuk menyelesaikan atau mengatasinya ?

Pertanyaan untuk Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

1. Bagaimana mekanisme/prosedur dalam pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pak ?
2. Selama dalam melayani masyarakat apa saja faktor yang menjadi penghambatnya ?
3. Jika terjadi kekosongan blangko dan masyarakat banyak yang ingin membuat KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan lainnya. Berapa lama waktu minimal atau maksimal yang dibutuhkan untuk mengatasi itu ?
4. Setelah mengetahui adanya kendala tersebut, siapakah yang berwenang untuk menyelesaikan atau yang mengatasinya ?

Pertanyaan untuk Kepala Seksi Pendataan Penduduk :

1. Bagaimana mekanisme/prosedur dalam pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pak ?
2. Selama dalam melayani masyarakat apa saja faktor yang menjadi penghambatnya ?
3. Bagaimana upaya atau langkah yang diambil dalam untuk menyelesaikan masalah tersebut ?
4. Setelah mengetahui adanya kendala tersebut, siapakah yang berwenang untuk menyelesaikan atau mengatasinya ?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pertanyaan untuk Kepala Seksi Identitas Penduduk :

1. Selama dalam melayani masyarakat apa saja faktor yang menjadi penghambatnya?
2. Bagaimana upaya atau langkah yang diambil dalam untuk menyelesaikan masalah tersebut ?
3. Setelah mengetahui adanya kendala tersebut, siapakah yang berwenang untuk menyelesaikan atau mengatasinya ?

Pertanyaan untuk Pelaksana Disdukcapil :

1. Selama dalam melayani masyarakat apa saja faktor yang menjadi penghambatnya?
2. Bagaimana upaya atau langkah yang di ambil untuk menyelesaikan masalah/faktor penghambat tersebut ?
3. Setelah mengetahui adanya masalah/faktor penghambat tersebut, siapakah yang berwenang untuk menyelesaikan atau yang mengatasinya ?

Pertanyaan untuk masyarakat :

1. Apakah penyediaan informasi tentang prosedur atau mekanisme pelayanan dalam pendaftaran penduduk mudah untuk di dapatkan ?
2. Apakah persyaratan pendaftaran penduduk mudah untuk di dapatkan ?
3. Bagaimana kemampuan petugas dalam memberikan informasi pelayanan pendaftarana penduduk kepada masyarakat ?



## DAFTAR PENGISIHAN ANGKET

### A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang terdapat dalam angket ini hanya untuk memperoleh data tentang “Mekanisme Pelayanan Terhadap Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

### B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Lingkari huruf a dan b sesuai jawaban yang anda pilih
2. Angket ini hanya digunakan untuk penelitian
3. Kejujuran sangat dibutuhkan pada pengisian angket ini

### C. Identitas Mahasiswa

Nama : Delwita Elsanti  
Nim : 1162720398  
Jurusan : Ilmu Hukum

### D. Identitas Responden

Nama		
Umur		
Jenis keamin	1. Laki-laki	2. Perempuan
Pendidikan Terakhir	1. SLTP 2. SLTA	3. D1,D2,D3,D4 4. S1 5. S1 Keatas
Pekerjaan	1. PNS/TNI/Polri 2. Karyawan/BUMN 3. Karyawan Swasta	4. Pelajara/Mahasiswa 5. Wiraswasta/Pengusaha 6. Lainnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**E. Pertanyaan**

a.
1. Apakah informasi mengenai persyaratan pendaftaran penduduk mudah di dapatkan ? <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mudah</li> <li>b. Tidak mudah</li> </ol>
2. Apakah kemampuan petugas sudah cukup jelas dalam memberikan informasi pelayanan pendaftaran penduduk ? <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jelas</li> <li>b. Tidak jelas</li> </ol>
3. Apakah petugas pelayanan bersikap ramah dalam memberikan pelayanan ? <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ramah</li> <li>b. Tidak ramah</li> </ol>
4. Apakah waktu penyelesaian akta pencatatan sipil sudah tepat waktu dengan ketentuan yang berlaku ? <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tepat waktu</li> <li>b. Tidak tepat waktu</li> </ol>

## DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu**



**Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu**



**Wawancara dengan Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyebaran Angket





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU<sup>1</sup>  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan- Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp./ Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/320/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 13 Januari 2020

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: DEL WITA ELSANTI
NIM	: 1627203986
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:MEKANISME PELAYANAN TERHADAP PENDAFTARAN PENDUDUK PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96  
TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN  
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1/005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmpstsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/29691  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.I/PP.00.9/320/2020 Tanggal 13 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **DELWINTA ELSANTI**
2. NIM / KTP : **11627203986**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jurusan : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **MEKANISME PELAYANAN TERHADAP PENDAFTARAN PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**
7. Lokasi Penelitian : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.  
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.  
Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu

... Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Renqat

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Indragiri No. Telp. ( 0769 ) 341091 Fax ( 0769 ) 341091  
**RENGAT - 29350**

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 470/DKPS/IV/2020/153

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAIFUL BAHRI, S.Sos  
NIP : 19691024 198909 1 001  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DELWITA ELSANTI  
NIM : 11627203986  
Asal Pendaftaran : Desa Kota Baru, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : Mekanisme Pelayanan terhadap Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.  
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Kegiatan Penelitian riset dan pengambilan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan yang dibutuhkan.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 13 April 2020

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



**SYAIFUL BAHRI, S.Sos**  
NIP. 19691024 198909 1 001









# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DELWITA ELSANTI  
NIM : 11627203986  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul : MEKANISME PELAYANAN TERHADAP PENDAFTARAN  
PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN  
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pembimbing : Dr. Abu Samah, MH.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 Juli 2020

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### RIWAYAT PENULIS



**Delwita Elsanti**, dilahirkan di Kota Baru pada tanggal 10 Juni 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Darmawil dan Eliya. Penulis menempuh pendidikan mulai dari TK Raudatul Jannah tamat pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 003 Kota Baru tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 001 Rakit Kulim tamat pada tahun 2013 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 001 Rakit Kulim yang tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri Pekanbaru setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tanggal 25 Juni 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Mekanisme Pelayanan terhadap Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil”.

UIN SUSKA RIAU